

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kab Mojokerto sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Bupati Mojokerto No 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto ialah penunjang bagi urusan pemerintahan. Bagian unit kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. UU No 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya bersifat sentralistik. Dalam setiap satuan pemerintahan yang saling membawahi untuk artian satuan pemerintahan yang berada dibawahnya. Hal tersebut menjadikan satuan pemerintahan yang dibawah dengan sub ordinat daripada pemerintahan yang atas. Pemerintahan provinsi sebagai bagian sub ordinat untuk pemerintahan pusat, pemerintahan kabupaten/kota ialah sub ordinat bagi pemerintahan provinsi, pemerintahan kecamatan ialah sub ordinat bagi pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintahan desa/kelurahan merupakan sub ordinat untuk pemerintahan kecamatan. Dampak yang logis dari kondisi pemerintahan yang seperti itu membuat hilangnya kebebasan/keleluasaan satuan pemerintahan bawahan dalam berinisiatif atau berkreasi. Pemerintahan untuk level bawah bekerja atas perintah dan petunjuk pemerintah di atasnya. Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang berguna bagi institusi. Lembaga pada publik adalah bentuk tanggung jawab sosial. Agen masyarakat melayani kebutuhan komunitas untuk tata kelola yang bertanggung jawab. Bersikap transparan dan akuntabel. Salah satu faktornya adalah akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan anggaran sangat penting pada konteks tata pemerintahan yang baik. Evolusi organisasi terkait erat dengan suatu kelanjutan hidup (Pertiwi 2015:2). Sektor publik yang sering dipandang sebagai sarang pemborosan, inefisiensi, serta sumber permodalan, dan institusi yang terus saja merugi, yang membuat organisasi sektor publik memiliki tuntutan baru terhadap nilai uang untuk menjalankan aktivitasnya.

Value for Money adalah rancangan manajemen organisasi pada sektor publik yang didasarkan tiga elemen kunci , yaitu; ekonomi, efisiensi dan efektivitas Mardiasmo (2002:4). Teori Stewardship diuraikan oleh Hernandez (2008) sebagai tindakan dan perilaku. Hal ini dapat memprioritaskan suatu urusan dalam waktu jangka panjang pada kategori di atas tujuan pribadi dalam melayani untuk keuntungan pribadi. Ketika para aktor dalam organisasi bergerak maju tanggung jawab pribadi atas dampak perilaku organisasi terhadap kesejahteraan mereka yang tertarik. Davis dll. (1997) Auditia (2013: 24) implementasi akuntansi yang benar oleh suatu instansi pemerintah dan pengawasan yang maksimal terhadap kualitas pelaporan keuangan oleh instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kegiatan instansi pemerintah, sehingga kinerja seluruh urusan pemerintahan dapat terlaksana secara maksimal.

Berdasarkan laporan realisasi penyerapan anggaran bulan Januari dan Februari 2021 maka terdapat permasalahan utama yaitu penyerapan anggaran masih terlalu rendah jauh dari penyerapan anggaran yang telah ditetapkan sehingga kurang tertibnya administrasi dalam pengelolaan SKPD. Dalam hal ini BAPPEDA menerapkan aplikasi pada SOP TAPA agar lebih tertib administrasi. Oleh karena itu penelitian ini, dilakukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan tertib administrasi penyerapan anggaran pada SOP TAPA di BAPPEDA Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan konsep “*value for money*”. Bahwa sesuai peraturan yang ada pelaksanaan tertib administrasi penyerapan anggaran pada SOP TAPA di BAPPEDA Kabupaten Mojokerto ini diharapkan telah sesuai peraturan yang ada dalam melaksanakan tertib administrasi penyerapan anggaran sebagai tolak ukur kinerja yang optimal.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian yang memiliki kesenjangan pada fenomena penelitian yang dibahas oleh peneliti dikarenakan peneliti hanya mendapatkan jurnal yang tempat penelitiannya sama namun fenomena yang berbeda. Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. (2018) Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa mewujudkan nilai transparansi yang terwujud dalam akuntabilitas publik dan negara berdasarkan aturan keterbukaan dan proses akuntansi keuangan dan menggunakan sistem berbasis akrual, konsep “Value for

Money” menunjukkan hasil yang ekonomi, efektif dan efisien dalam otoritas perencanaan dalam pengembangan pada Wilayah Kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini memiliki objek penelitian yang berbeda namun tetap membahas tentang anggaran. Achmad Fauzan Sirat (2019) hasil kajian menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kelayakan dan efektivitas kebutuhan keuangan, sebagaimana tertuang dalam PP 90/2010 tentang penyusunan dalam dokumen anggaran. Namun, dalam menjalankan mandatnya, Kementerian Keuangan tidak memiliki pedoman yang memadai untuk melakukan penilaian karena tidak memiliki informasi yang lebih rinci tentang cara melakukan penilaian dalam kelayakan. Walidi (2017) dalam studinya, perbaikan struktur biaya melalui standar biaya yang diperhalus waktu ke waktu merupakan modal dasar untuk mencapai efisiensi alokasi dan pelaksanaan dalam suatu sistem anggaran. Syaharudin Yasin (2017) hasil yang diperoleh dari 10 (sepuluh) desa sampel yang melaksanakan tugas dan fungsi sekretaris desa hanya pengelolaan keuangan sesuai rencana. Namun, administrasi desa lainnya tidak diatur sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 32 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan desa termasuk pengisian, penyediaan dan penyimpanan. Parameter kedua adalah kualitas yang diekspresikan melalui keteraturan, kebersihan dan penghormatan terhadap aturan. Semua desa sampel dalam penelitian ini tidak memiliki buku pengelolaan sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No. 32 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan desa. Hal ini berbeda dengan peneliti yang lebih membahas tentang pelaksanaan tertib administrasi di BAPPEDA bukan di Desa. Agus Supriadi Harahap (2018) Hasil penelitian adalah penerapan e-government dalam proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Depok Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum terintegrasi ke dalam sistem. Selanjutnya, implementasi e-government pada satker peserta proses pemberian IMB juga belum lengkap dan belum maksimal dalam perbaikan proses kerja. Aplikasi dan infrastruktur TI yang digunakan dalam proses penerbitan IMB tidak dioptimalkan untuk memfasilitasi proses penerbitan IMB. Dalam penelitian ini lebih berfokus kepada penerapan e-government. Wayan Dedi Juniawan (2020) analisis dari sistem perencanaan pembangunan terpadu melalui implementasi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian juga menganalisis dan mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang menjadi pendukung dan yang menghambat seperti faktor teknis

(infrastruktur TIK, keamanan, output dan fitur sistem, SOP, dan pelatihan teknis) dan faktor sosial/ organisasi yang meliputi komitmen pimpinan, budaya kerja, komunikasi dan SDM pelaksana. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada sistem perencanaan pembangunannya. Beberapa hal tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian berjudul “Aplikasi SOP TAPA Dalam Upaya Mengoptimalkan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Value For Money”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan tertib administrasi penyerapan anggaran pada SOP TAPA di BAPPEDA Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan konsep “*value for money*”.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Pendekatan ini menggunakan *qualitative research*. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan berbagai cara : melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai melalui langkah pengumpulan data, melaksanakan reduksi data hasil wawancara pada kepala BAPPEDA, sekretaris BAPPEDA, kasubag umum BAPPEDA, dan fungsional perencanaan BAPPEDA dan Bendahara BAPPEDA kemudian melaksanakan penyajian data, dan untuk langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan triangulasi data.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Topik dalam penelitian ini dimulai dengan penjelasan pelaksanaan tertib administrasi penyerapan anggaran yang tepat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya akan dijelaskan dan dibahas mengenai bagaimana menerapkan penyerapan anggaran kegiatan/sub. kegiatan lebih tertib administrasi. Jika terdapat kendala dan permasalahan di dalamnya maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah memberikan rekomendasi yang konsisten dengan peraturan yang ada. Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa teori ini memberikan manfaat

untuk akademis dalam perkembangan ilmu pemerintahan kedepannya. Dan penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur pada penelitian selanjutnya.

1.6 Kontribusi Riset

1.6.1 Manfaat teoritis

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa teori ini memberikan manfaat untuk akademis dalam perkembangan ilmu pemerintahan kedepannya. Dan penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur pada penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam hal penelitian ini, yaitu sebagai saran masukan kepada pemerintah daerah, khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk mencapai tata pemerintahan yang baik dengan nilai transparansi atau keterbukaan informasi dan tertib administrasi.

1.6.3 Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan sistem penerapan tertib administrasi SOP TAPA di BAPPEDA Kabupaten Mojokerto.

1.7 Uji Ketahanan

Uji ketahanan menggunakan dengan cara triangulasi data agar mendapatkan kebenaran data dan informasi pada penelitian.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab dalam penelitian ini menjelaskan beberapa hal yang terdiri dari latar belakang penelitian, kesenjangan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, manfaat riset, uji validitas dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dalam penelitian ini menjelaskan studi literatur yang terkait dengan topik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *stewardship theory*. Bab ini juga menjelaskan penelitian sebelumnya untuk perbandingan dengan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti. Bab ini ialah tentang struktur berpikir dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian yang merupakan studi kasus kualitatif. Prosedur pengumpulan data menggunakan jenis dan sumber data, studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi untuk penelitian ini didapatkan dari data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah merumuskan latar belakang masalah, mengumpulkan data, melakukan pengolahan data, triangulasi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengawali pembahasan penelitian dengan uraian tentang pelaksanaan tertib administrasi penyerapan anggaran pada SOP TAPA di BAPPEDA Kabupaten Mojokerto sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Selanjutnya membahas proses pelaksanaannya, dan menganalisis permasalahan dengan data yang ada. Setelah itu, membuat rekomendasi berdasarkan aturan dan *standart* akuntansi yang berlaku.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab dalam penelitian ini ialah bab terakhir yang berisi uraian tentang rangkuman hasil pembahasan, keterbatasan dan saran kepada Pemerintah khususnya BAPPEDA, dalam pelaksanaan kegiatan publik dalam hal pertanggungjawaban administrasi SOP TAPA.